

	“Meeting Notes ” (Pk. 13.00-16.30 WIB)		Tanggal Laporan: 29 Februari 2020
	Lokasi: Joglo Winasis	Tanggal: 28 Februari 2020	
Notulen: Mohamad Yusuf Project Officer :	Perihal: ”Kiprah Perempuan Desa dalam Percepatan Pencapaian SDGs”		Distribution: Peserta Rapat

SESI PERTAMA

Diskusi (13.30)

Moderator : Erwin Razak

Pembicara:

1. Dina Mariana (IRE Yogyakarta)
2. Ari Indah Hayati (BPD Argorejo, Sedayu Bantul)
3. Fitnasih (Aktivis Penggerak Wisata Desa Karangrejo Kabupaten Magelang Jawa Tengah)

(Erwin)

Selamat siang bapak dan ibu semua. Pada siang hari ini IRE bersama saudara akan berdiskusi terkait suatu permasalahan agar menjadi lebih baik. Dan untuk mendiskusikan itu kami mendatangkan pembicara, pertama Mbak Ari Indah Hayati, kedua Mbak Fitnasih atau Mbak Cemplon dari Magelang, dan ketiga Mbak Dina peneliti IRE. Topik hari ini adalah bagaimana kiprah perempuan dalam usaha percepatan pencapaian SDGs. Kami mencoba menarik SDGs ke bawah atau kita bumikan agar masuk dalam kehidupan perempuan desa. atau sebaliknya bagaimana perempuan desa memberikan pelajaran kepada SDGs ke depannya.

Ada tiga topik yang akan didiskusikan. Pertama kita akan mendiskusikan problem pemberdayaan perempuan yang ada di desa dalam ekonomi dan politik. Kedua, kita akan mendiskusikan bagaimana strategi menghadapi ketidakadilan yang ada di desa. Dan ketiga kita akan mendiskusikan bagaimana peran kita sebagai penggerak masyarakat atau CSO untuk mengembangkan strategi yang lebih baik lagi agar membatu siapa saja yang ingin memajukan desa. Silakan Mbak Cemplon untuk memulai.

(Fitnasih)

Assalamualaikum wr wb, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Cemplon dari Karangrejo. Saya merupakan pelaku wisata desa. Awalnya saya merupakan pembuat batu

bata secara manual. Pada tahun 2017 akhir saya jalan-jalan ke Putuk Setumbu. Tetapi ketika saya istirahat ada yang meminta untuk diantarkan ke Putuk Setumbu dan setelah sampai saya diberi uang sebesar 100 ribu. Dari sini saya berpikir, enak sekali bekerja seperti ini jika sehari 5 kali mengantarkan bisa mendapatkan 500 ribu. Ini juga yang memicu saya untuk berpikir bagaimana menjadi Tour Guide yang baik. Saya mencari informasi, dan mendapatkan informasi pelatihan dari kakak saya yang mengadakan IRE. Dari pelatihan inilah saya mendapatkan pelajaran yang banyak sekali, bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi desa. Dari sini, saya kembangan dengan menjual paket wisata dengan melibatkan masyarakat terutama perempuan yang ada di desa.

Dalam perjalanan usaha saya ada kendala. Karena selama ini tamu yang saya dapatkan langsung diangkut dengan menggunakan minibus. Ternyata cara yang saya gunakan membuat ibu-ibu tukang ojek terpinggirkan karena selama ini tidak saya berdayakan. Saya sadari hal ini setelah saya ditegur oleh ibu-ibu, kenapa selama ini tidak pernah mengajaknya mengantar penumpang. Kemudian saya beri saran untuk menumpulkan warga yang ada di sini dan di data, ternyata sebanyak 70 orang. Ternyata banyak sekali, ini membuat saya berpikir untuk membuat organisasi lengkap dengan strukturnya.

Setelah ada organisasi pun ada kendala lagi yaitu keaktifan anggota. Ketika saya mendapatkan tamu sebanyak 30 orang, anggota yang mengkonfirmasi untuk mengantar hanya 10 orang di grup WA. Kemudian saya datangi salah satu anggota saya dan ketika saya tanya beliau siap. Saya mendatangi sampai 10 orang dan saya capek. Saya berpikir kenapa kok begini, kenapa harus di datangi satu persatu. Tetapi setelah saya ketemu dengan salah satu anggota saya yang lain untuk mengkonfirmasi bisa atau tidak. Ternyata anggota saya ini menjelaskan bahwa apa yang saya lakukan itu sangat membantu beliau. Dari sini saya tersentak dan berpikir kalau saya memang harus berjuang. Dari sinilah terbentuk organisasi Mowis atau Motor Wisata dengan anggota 60-70 orang. Organisasi ini pun memiliki agenda berdiskusi bersama. Kami juga mengembangkan paket penginapan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Saat ini kami mendampingi 50-60 home stay yang ada di dusun Putuk Setumbu atau Desa Karangrejo. Kami melakukan ini untuk mendorong perekonomian desa secara luas tidak terisolasi ke wilayah tertentu saja, sehingga membuat desa menjadi lebih baik.

Kami juga memberdayakan Ibu-ibu PKK sebanyak 35 orang. Kami berdayakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Jadi ketika ada pengunjung kami jamu dengan makanan dari ibu-ibu itu tadi. Kelompok ini juga lengkap memiliki struktur, sehingga jelas

jatah siapa yang akan mendapatkan kesempatan. Kemarin dari acara 3 hari 2 malam, ibu-ibu PKK mendapatkan 26 juta. Tekat saya adalah Masyarakat berdaya, jangan sampai masyarakat desa didominasi oleh elite. Kami juga berpikir bagaimana pengunjung tidak hanya ke Borobudur saja tetapi mereka juga ke desa, sehingga membuat ekonomi desa terangkat. Terima kasih itu dari saya.

(Erwin)

Sebelum ke Mbak Arie, Masalah utama perempuan desa dalam mengembangkan wisata apa?

(Fitnasih)

Masalah utama itu pelayanan dan penampilan. Saya mencoba menyelesaikannya dengan cara lebih halus. Memberikan nasihat berkedok respons dari pengunjung.

(Erwin)

Selanjutnya kepada Mbak Arie. Sebenarnya kendala perempuan dalam politik desa itu bagaimana?

(Arie)

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arie Indah Hayati, BPD Argorejo Sedayu Bantul. Terkait bagaimana perempuan masuk ke dalam politik desa? BPD itu kan sebenarnya DPR ditingkat desa. Sehingga kalau mau masuk ke dalamnya tidak ada perbedaan ketika mencalonkan diri menjadi dewan, hanya sekalanya lebih kecil. Dari pengalaman saya awal itu terkaget-kaget, karena cukup susah masuk ke dalam politik desa, ada politik uang. Karena ada dapilnya juga. Yang diamanatkan Kemendagri itu minimal satu. Di dapil-dapil perempuan sebenarnya sudah muncul, di daerah saya dari delapan dapil ada dua yang perempuan dan bagus kualitasnya. Masalahnya itu sama karena perempuan tidak mengerti lobi, tidak punya uang hanya bermodal berani saja. Tetapi lawanya atau calon laki-laki sudah memiliki peta kantong suara. Di Bantul ada 98 anggota BPD perempuan dengan jumlah desa 75. Ada yang satu desa memiliki 3 BPD perempuan, sementara di desa saya hanya satu. Ada satu ini pun karena adanya premendagri.

Saya melihat panitia pemilihannya sebenarnya tidak paham juga. Sehingga mereka tidak paham kalau ada kuota, beberapa teman itu bahkan ditunjuk karena faktor kedekatan. Di Bantul sedang berjuang untuk Perda BPD. Terkait dengan tata laksana pemilihan, sosialisasi, siapa yang menjadi panitia, mekanismenya seperti apa untuk pengajuan? Ini yang teman-teman perempuan belum paham. Saya yakin secara kemampuan pasti paham. Padahal kalau kita berbicara politik di tingkat desa, peran perempuan itu sangat penting. Jika kita

kaitkan dengan SDGs poin-poinnya itu sudah dilakukan oleh perempuan di desa. Karena banyak bersentuhan dengan perempuan. Kalau kita lihat SDGs itu ada pilar pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan pemerintahan. Jika kita ingin mempercepat SDGs perempuan sangat berhubungan dengan ini. Misalnya pembangunan manusia, kita tahu betul bahwa pendidik awal adalah perempuan. Di desa saya dulu kegiatan PKK hanya arisan, pelatihan memasak dll. Dan ketika saya sudah masuk ke dalam melihat semua ini, saya kemudian berdiskusi dengan mereka. Dari sini saya berpikir bahwa pembangunan manusia harus dimulai dari perempuan terlebih dahulu, membuka pikiran mereka kalau peran mereka penting. Sehingga saya mulai mengajak kalau melakukan kegiatan tidak hanya masak-memasak dan hal sepele lain. Selama ini PKK belum pernah secara aktif melakukan pembangunan kapasitas anggotanya, selama ini hanya menerima saja dari atas.

Dari sini saya berpikir untuk melakukan pendidikan politik kepada perempuan. Saya meminta waktu bersama mereka untuk berdiskusi peran perempuan. Pertama saya mencoba memahami perempuan kenapa ada permendagri yang mengharuskan keterwakilan perempuan di dalam BPD. Awal saya masuk di BPD itu juga menimbulkan konflik, karena selama ini tidak aktif sebagai anggota PKK. Waktu itu saya pun di minta bukan atas kesadaran sendiri masuk ke BPD. Ketika saya memberikan pendidikan politik, saya selalu mendorong agar perempuan mau menjadi aparat desa. Ketika Kades meminta saya untuk membantu di desa awalnya saya juga tidak yakin. Tetapi saya kemudian mendaftar, dari sini kemudian ada yang mendaftar juga perempuan padahal sebelumnya tidak ada. Ini juga menimbulkan konflik, lawan saya anggota aktif PKK dan saya tidak aktif. Saya sadar betul saya tidak begitu dikenal masyarakat. Karena perempuan tidak terbiasa dipilih dan memilih akhirnya terbentuk gap-gap kelompok. Karena terjadi kondisi seperti ini, saya meminta kepada panitia pemilihan untuk ada sesi Fit dan Proper test. Saya meminta itu agar kehadiran saya tidak menimbulkan konflik di bawah. Dan ketika ada sesi ini saya kemudian mendapatkan suara sebanyak 16 yang kedua 6 dan ketiga 0, dia bahkan tidak memilih dirinya sendiri malah memilih saya. Dan ketika ditanya kenapa mencalonkan diri, jawabannya mengikuti saya berani mencalonkan diri.

Setelah pemilihan pun masih terjadi gap-gap, ini menjadi PR saya untuk membuat kegiatan yang intinya nanti kita ketemu terus. Sehingga membiasakan bahwa berbeda itu tidak apa-apa. Apa pun pendapat usulan mereka harus kita hargai dan dengarkan. Saya berusaha pura-pura tidak tahu kalau mereka memusuhi saya dan akhirnya mereka mau aktif

kembali di PKK. Usaha yang kami lakukan untuk mengubah mindset adalah dengan mengadakan kegiatan perpokja. Dan ketika kegiatan mereka yang menjadi panitia sementara saya hanya membimbing saja. Saya membantu ketika berhubungan dengan pihak luar. Akhirnya mereka bisa berjalan sendiri dan melakukan tugas administratif dengan baik. Dan ketika ada permasalahan di masyarakat saya sampaikan di grup WA. Mereka kemudian merespons permasalahan yang saya sampaikan sesuai dengan pokjanya. Mulai dari hal-hal kecil ini untuk mengubah cara berpikir. Dan saya selalu menekankan bahwa peran perempuan itu sangat penting. Ketika Musdus saya bilang kepada kepala dukuh 30% perempuan minimal untuk hadir. Tetapi pada kenyataannya banyak kendala, beralasan kalau diundang tidak datang. Kemudian saya tanya kepada salah satu ibu apakah benar diundang, jawabannya tidak. Padahal ketika di beri undang si ibu bilang akan datang. Kemudian saya tegur kepala dukuhnya. Saya kira memang perubahan itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, mengingat kondisinya seperti itu. saya kira itu dulu dari saya.

(Erwin)

Menarik yang disampaikan Mbak Arie. Pertama mengawali dengan cerita awal berkiprah di politik desa. Dan yang paling menarik di akhir terkait permasalahan undangan kepada perempuan ini cukup klasik. Ini bisa di elaborasi lebih jauh, masalah undangan ini problem nyata atau problem perempuannya atau kedua-duanya dan jalan keluarnya seperti apa untuk keterlibatan perempuan dalam membangun desa. Selanjutnya dilanjutkan dengan Mbak Dina akan membahas dari segi kebijakan terkait peran perempuan dalam implementasi SDGs.

(Dina)

Ibu dan bapak yang saya hormati terima kasih sudah hadir. Joglo ini merupakan saksi dari advokasi perempuan 30% dalam BPD. Advokasi awal kami di Kabupaten Seleman, karena waktu itu sedang membuat Raperda BPD. Dan ini tidak mudah, tantangan yang kami hadapi waktu itu ada dua. Pertama asumsi yang dibangun oleh pemerintah daerah dan DPRD, banyak perempuan tidak memiliki keinginan untuk berkiprah. Kedua perempuan dinilai tidak memiliki kapasitas. Dua hal ini yang dengungkan untuk mempertanyakan advokasi yang sedang kami lakukan. Tanpa di sadari ketika berbicara BPD fungsi yang paling penting adalah representasi bukan teknokratis. Yang penting adalah untuk menyuarakan suara-suara dari bawah agar menjadi kebijakan ditingkat lokal. Tidak perlu kapasitas yang tinggi sekali tetapi yang diperlukan adalah kemauan yang tinggi untuk peduli,

mau mendengarkan dan keberpihakan kepada isu-isu keadilan gender. Itu yang sering kali lupa dipahami oleh para pembuat kebijakan.

Saya ingin merespons dari yang disampaikan oleh Mbak Arie. Ketika saya menghadiri di acara pendidikan politik bagi perempuan anggota BPD. Ada satu orang yang menghampiri saya kemudian cerita kalau di desanya ada mitos, kalau ada perempuan yang duduk di pemerintahan desa itu tidak akan pernah langgeng. Mitos ini dibangun untuk memperkuat maskulinisasi desa, ini desanya padahal di Sleman. Ternyata Sleman yang kita anggap sebagai kawasan urban dan melek pengetahuan, politik, masih ada yang primitif seperti itu. Akhirnya ada perempuan itu setelah dipaksa Permen, mewajibkan minimal satu. Ini tidak kebayang kalau tidak ada pasti budaya seperti ini akan berlangsung dari generasi ke generasi. Sleman yang diasumsikan sebagai kota pelajar karena banyak universitas, tetapi faktanya kita masih menemukan yang seperti itu. Ini tantangan yang tidak mudah juga bagi teman-teman yang selama ini mengadvokasi kebijakan. Ini cerita terkait politik lokal.

Saya ingin cerita lagi terkait Mbak Cemplon, menemukan beliau ini tidak mudah. Alternatif bagi perempuan desa itu migrasi ke kota. Mbak Cemplon juga sempat harus melakukannya dan meninggalkan anak ke kota. Dia kemudian cerita bagaimana kami ini, bisa tetap tinggal di desa tapi juga punya sumber penghidupan. Prosesnya cukup cepat karena semangatnya cukup tinggi, kita hanya mengenalkan prinsip pembangunan inklusif dan ternyata bisa digunakan untuk mengelola paket-paket wisata yang belum ada sebelumnya. Misalnya Karangrejo itu tidak dikenal sebagai wilayah pengrajin batik, kreativitas dari teman-teman kemudian mendorong ibu-ibu yang menganggur sebelumnya untuk latihan membatik. Terus tadi ada ojek motor, ojek sepeda, ibu-ibu PKK, jadi ketika ada ruang untuk mengelola/ akses untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada di desa, mereka juga cepat proses adaptasinya. Awalnya ingin ikut mengelola Putuk Setumbu itu tidak mudah karena faktor kontur pegunungan, warga yang usianya 40 ke atas itu berat untuk ikut andil. Akhirnya teman-teman mencari alternatif agar mereka juga mendapatkan penghasilan. Termasuk yang dilakukan oleh teman-teman adalah keluarga-keluarga miskin kemudian dijadikan home basenya kuliner untuk bisa latihan masak di sana, makan di sana ini juga menjadi paket wisata. Saya pikir ini sangat menarik karena dengan sentuhan kecil saja ternyata teman-teman bisa beradaptasi dengan sangat cepat.

Kemudian saya akan bercerita bagaimana melembagakan cerita-cerita baik ini ke dalam kebijakan desa. kalau isu SDGs itu kan sudah cukup lama kita dengar. Tetapi ketika kita ke desa, kita masih menemukan pemerintah desa yang masih belum paham bagaimana

menginternalisasikan isu SDGs ke dalam RPJM desa. Ternyata isu ini tidak sampai dan berhenti di RPJMD. Padahal ketika kita buka target-target SDGs, pertama terkait mengakhiri kekerasan kepada perempuan, ini terjadi di desa. kemudian mengeliminasi segala bentuk kekerasan kepada perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, riset kami membuktikan ini banyak terjadi. Riset kami di Jawa Timur bagian pesisir masih terjadi trafficking, anak di bawah umur di lacurkan. Ketiga menghapus semua praktik-praktik yang membahayakan seperti perkawinan anak, dini, paksa dan sunat pada perempuan. Ini terjadi dan begitu dekat dengan kita, tetapi ini tidak pernah diterjemahkan secara baik di RPJM desa. ini yang sebenarnya menjadi kritik kita, kenapa kemudian target-target SDGs itu baru berhenti pada level kabupaten belum masuk pada level desa, padahal seperti apa yang saya jelaskan tadi. Ini sangat berhubungan dengan kerja dari Mbak Arie, kehadirannya sebagai representasi perempuan sebagai anggota BPD adalah bagaimana mengawal target-target ini untuk masuk ke dalam kebijakan desa. kalau seperti ini sebenarnya soal sensitivitas dan keberpihakan bukan masalah teknokrasi yang selama ini di keluhkan oleh pemerintah daerah yang selalu menolak kuota 30% perempuan. Kalau masalah kapasitas bisa di update dengan pelatihan dan pendampingan. Yang justru penting adalah mereka diberikan ruang untuk bisa hadir di keanggotaan BPD baru berbicara kapasitas dan sensitivitas. Artinya dari dua cerita ini tantangan kita berbicara mendorong keadilan gender bukan upaya yang mudah. Kita masih dihadapkan pada maskulinisasi pembangunan desa. Dan tidak jarang perempuan juga tidak menjadi pendukung bagi perempuan yang lain. Mungkin itu dulu, nanti kita bisa ngobrol lebih panjang.

(Erwin)

Terima kasih Mbak Dina. Semakin menarik memang kecenderungan sekarang itu perlu ada kebijakan dari pusat agar membantu keterlibatan perempuan di dalam politik. Sejauh ini memang tidak banyak yang tahu, kalau sekarang ada peluang bisa masuk menjadi BPD. Yang perlu dicari adalah akar masalahnya, ini yang bisa kita diskusikan silakan untuk bertanya.

Sesi Tanya Jawab

(Diana)

Saya memiliki pengalaman pendampingan perempuan dalam pengimplementasian SDGs. Kami mencoba mendorong perempuan berpartisipasi dalam pemilihan BPD. Dari 35 yang kami calonkan hanya 8 yang jadi. Kendala pertama ijin suami. Kedua kesempatan belum ada. Isu yang lain yang kami advokasi adalah gizi buruk, dari sini ternyata

berhubungan dengan masalah lain yang ada di desa. Ternyata setelah di pelajari permasalahan stunting dari 8 anak itu. Pertama ada permasalahannya tidak memiliki suami tetapi memiliki 4 anak. Kedua, kekerasan dalam keluarga karena relasi kuasa yang timpang mengakibatkan anak stunting. Ketiga ada yang tidak memiliki jamban. Kemudian akses yang cukup jauh dari pasar, pendidikan juga sama. Kemudian kesehatan, ke rumah berobat itu aksesnya terputus jalanya seperti sungai kering, baru tahun ini jalan diperbaiki. Rekomendasi yang kita berikan beberapa mulai kembali menggali lagi kearifan lokal. Misalnya setiap rumah membuat satu kandang, kolam dan kebun. Kemarin kami menggalakkan cangkul gilir. Sekarang mereka menggalakkan uang kas, jika butuh nanti diganti dengan ayam babon. Ini baru di satu pedukuhan kelompok perempuan. Untuk Bum desa baru tahun depan pelaksanaannya agar menjadi payung perekonomian desa.

(Yeni)

1. Bagaimana menurunkan bahasa SDGs ke dalam praktik keseharian di desa?
2. Terkait mitos di desa saya terkait perempuan juga masih terjadi. Bagaimana menyosialisasikan peraturan yang terkait partisipasi perempuan di desa?
3. Bagaimana langkah pendekatan awal untuk menunjukkan perempuan memiliki peran penting?

(Sumantoro)

1. Terkait permasalahan mafia di desa itu bagaimana penyelesaiannya?
2. Bagaimana peran CSO dan Kampus dalam mencerahkan masyarakat sekitarnya agar tidak konservatif?
3. Saya mengapresiasi Mbak Cemplon sudah menciptakan peluang kerja di desa sehingga membuat pertumbuhan.

Jawab

(Dina)

Miris mendengar ceritanya Mbak Diana tadi. Ternyata isu gizi buruk itu berkaitan dengan relasi gender yang timpang di desa. Jadi relasi gender yang timpang dampaknya akan ke mana-mana. Sederhananya begini, perempuan yang mengalami domestifikasi, tidak bekerja sementara suami bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ini kerentanan terhadap istri tinggi, ketika dia tidak memiliki posisi tar diakan rentan kekerasan dan sering kali berujung pada perceraian. Dan ketika bercerai, anak akan ikut ke ibu, bayangkan si ibu tidak bekerja. Cerita yang ke dua ternyata pelayanan publik dasar sangat dekat dengan perempuan, dari persoalan air bersih saja dampak ke kekerasan perempuan juga tinggi. Jadi istri di rumah

dan suami kerja ke ladang, ketika suami pulang istri harus menyediakan air bersih untuk mandi sementara untuk mendapatkan harus melalui jalan yang cukup jauh. Ketika air tidak ada di kamar mandi, maka yang terjadi adalah kekeeran kepada istri karena tidak mampu menyediakan air bersih. Tadi ada cerita akses pasar yang jauh juga berdampak pada stunting. Jadi banyak sekali cerita terkait layanan dasar itu justru berdampak pada perempuan. IRE pernah publikasikan tentang itu, perempuan, kemiskinan dan desa. Jadi itu menjadi sesuatu yang saling berelasi dengan yang lainnya. Kenapa saya mengatakan kerentanan kemiskinan itu dampaknya terhadap perempuan di desa.

Kedua, bagaimana menerjemahkan pembangunan berkelanjutan di desa. sederhananya begini, ketika berbicara pembangunan berkelanjutan akan berbicara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Orang sering membahas SDGs tetapi sering kali lupa relasi dari tiga aspek ini, sosial, ekonomi dan ekologi, ini sering kali saling menegasikan. Sederhananya seperti itu bukan mendamaikan, ketika kita berbicara aspek ekologi ada hal-hal yang kita tidak bisa berdamai, tetapi bagaimana tiga aspek ini dapat saling melengkapi satu sama yang lain. Kita sering kali bicara desa wisata tetapi lupa dampaknya mengeksploitasi lingkungan, akan banyak sampah yang diproduksi dari sektor wisata. Bagaimana desa memikirkan soal ini? Jadi kita bisa menyebut berkelanjutan jika sudah membicarakan tiga hal tersebut.

Kemudian dari Pak Sumantoro, ini menembak IRE. Karena IRE juga LSM juga banyak orang kampusnya kok bisa Sleman masih ada desa yang primitif? Kami juga menemukan yang primitif itu tidak hanya desa tetapi juga beberapa oknum di Pemda, kita bilang mereka primitif. Karena pola berpikirnya masih maskulin, ini termasuk kategori primitif. Penting juga memikirkan akar dari permasalahan ini, ketika pembuat kebijakan pola berpikirnya masih maskulin akan berdampak pada kebijakannya. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadi penanggung jawab terbesar untuk berbicara terkait pemberdayaan ekonomi, sosial, politik, utamanya adalah tugas negara. Teman-teman NGO dan kampus hanyalah suplemen yang memberikan masukan tambahan, kita tidak sedang mengambil alih peran negara tetapi mendorong negara untuk lebih care terhadap persoalan tersebut. Ini negara dan daerahnya sudah benar atau belum? Kalau pengalaman advokasi kami, misal kuota BPD tetapi daerahnya seperti itu bisa menjadi wajar ketika desa seperti itu karena atasnya begitu. Mereka tidak percaya misalnya perempuan memiliki kapasitas untuk bisa menjadi anggota BPD. Tidak akan mau berbicara kuota 30%, padahal

ini masih sangat kecil. Siapa yang lebih tahu urusan sosial dan ekonomi di desa, perempuan. Jejaringnya itu kuat kalau sore kumpul sambil memberi makan anak misalnya. Tidak sedang gosip tetapi sedang berjejaring antar perempuan dari sini kami bisa tahu siapa lansia yang sedang sakit, anak putus sekolah, yang dililit hutang, ini urusan sosial ya. Bapak biasanya tidak tahu, baru tahu setelah diberi tahu istri. Tetapi itu tadi tidak banyak yang mendapatkan kesempatan untuk terlibat di dalam proses pengambilan keputusan desa. bagaimana bisa menghasilkan keputusan yang berpihak kalau yang datang Musdus hanya elite. Ini kenapa penting adanya representasi perempuan untuk menangkap isu seperti itu tadi. Jadi jangan lihat ini dengan kaca mata ini negatif, tetapi sebagai penangkap isu sosial. Itu yang bisa saya tambahkan.

(Erwin)

Merespons cerita dari Mbak Cemplon bahkan mengapresiasi karena memperlihatkan perempuan jika diberi peluang responsnya cepat dan memadai. Sekaligus menjawab keraguan terhadap perempuan kalau terlibat dalam ekonomi dan politik, ternyata hasilnya bisa lebih baik. Ini bagaimana bisa diceritakan lebih jauh.

(Fitnasih)

Terima kasih untuk Pak Sumantoro. Saya di desa lebih melibatkan masyarakat terutama dalam pariwisata. Karena saya melihat peluang, misal bandara sekarang pindah ke Kulon Progo jarak ke Borobudur kurang lebih setengah jam. Ini menjadi lebih dekat, otomatis wisatawan akan lebih banyak ke Borobudur, dinas memperkirakan sehari akan ada 20.000 wisatawan. Dari jumlah itu 14.000 ke Borobudur 6000 di Jogja. Kami berpikinya 14.000 itu mau diapakan, jangan sampai mereka ke Borobudur saja tetapi lebih ke desa. Desa-desa di Borobudur harus berpikir kreatif dan inovatif agar desanya lebih baik, terutama bagi anak-anak muda yang ada di desa. Dengan banyaknya tamu ke desa akan mengangkat ekonomi desa dan menjadikan desa lebih baik.

(Erwin)

Pertanyaan untuk Mbak Cemplon besok mau mencalonkan diri atau dicalonkan mau atau tidak ?

(Fitnasih)

Saya tidak akan mau menjadi lurah atau BPD, tetapi saya hanya ingin berpengaruh bagi masyarakat desa.

(Arie)

Untuk menjawab pertanyaan Mbak Yeni pembangunan berkelanjutan kalau di desa itu seperti apa? Dalam postur APBdes itu ada terkait target SDGs. Cuma prioritasnya seperti apa. Misalkan kemiskinan, strategi pencapaiannya mau seperti apa. Desa itu jarang yang memiliki data, data miskin saja mungkin tidak punya/ data profil. Tetapi permasalahannya apakah pejabat desa paham? Misal masalah sanitasi itu ada dan harus dianggarkan. Bagaimana kita mendorong itu agar menjadi prioritas. Dari sini perlu ada peningkatan kapasitas SDM desa selain dari fungsi representasi. Siapa pun bisa menjadi BPD tetapi ada kemauan atau tidak untuk memahami persoalan. Kalau kita berbicara pencapaian SDGs misal kemiskinan, desa punya data atau indikatornya atau tidak. Misal bicara soal pangan, ada aksesnya atau tidak? Sebenarnya perempuan banyak yang terlibat dalam teknisnya. Tetapi tidak sebagai pembuat kebijakan. Ini yang harus kita pahami kepada teman-teman perempuan, bahwa kehadiran mereka untuk mengawal itu. Mereka sudah terlibat di dalamnya. Cuma itu permasalahan dari perempuan adalah tidak percaya diri dan menganggap diri tidak mampu untuk menjadi perangkat desa. Padahal perempuan itu sudah melakukan apa yang diprasyarakatkan oleh SDGs. Ini menurut saya adalah masalah kesadaran. Misal Stunting tidak selalu karena ekonomi, bisa karena pernikahan dini. Jika kita berbicara pilar pembangunan manusia di sini peran perempuan sangat besar. Saya setuju kalau mengaitkan perempuan dengan SDGs. Misal masalah kebutuhan dasar, memang permasalahan yang ada dalam lingkungan perempuan sendiri, karena tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan akhirnya seperti itu. Oleh karena itu saya berpikir bagaimana membuka pikiran mereka dahulu bahwa peran mereka itu penting dan sudah terlibat di dalamnya setiap hari. Pembangunan ditingkat desa memang penentunya itu pemerintah desa sebagai pengguna anggaran, mau apa saja yang diprioritaskan. Pengalaman saya menunjukkan pembangunan fisik masih menjadi prioritas, ya karena forumnya masih maskulin. Sehingga persoalan yang sifatnya pemberdayaan ekonomi, gizi, SDM tidak muncul.

Pengalaman saya dalam musyawarah dusun. Bu dukuh misalnya hadir tetapi di belakang membuat jaman. Kemudian saya suruh untuk ikut, dan ketika saya suruh untuk

berbicara tidak mau. Tetapi ketika sudah saya pancing dengan pembahasan yang familiar mereka kemudian lebih banyak bicara dari pada saya. Ini artinya butuh pemantik, ketika forum tidak ada yang memantik maka akan muncul persoalan. Ini kalau perwakilan perempuan hanya satu menjadi masalah juga karena pasti kewalahan. Saya kira itu dari saya terima kasih.

(Erwin)

Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya akan coba saya kerucutkan terlebih dahulu agar pertemuan sore ini membuahkan hasil. Sebenarnya ada masalah besar, di dalam kegiatan sosial desa perempuan paling aktif, padahal perempuan untuk keluar dari rumah harus melewati berbagai kendala. Misal ketika menemui lansia yang sakit, dia harus mengorbankan waktu memasak atau menjemput anak. Namun sayangnya ketika ada peluang untuk kebijakan yang lebih baik lagi ada hambatan

1. pertama yang dari atas tidak membuka diri, kedua dari bawah tidak ada pemicu.
2. Program dan kebijakan tidak menyentuh kebutuhan dasar untuk keadilan dan kesetaraan.
3. Yang penting itu bukan teknokrasi atau kemampuan terlebih dahulu tetapi keberanian dan keberpihakan. Setelah masuk ke dalam ternyata kapasitas bisa dibangun. Ini yang paling penting untuk disampaikan ke pada perempuan.

Oleh karena itu saya ingin mengundang Mbak Reni. Pada titik apa CSO dapat ikut andil dalam pembangunan perempuan di desa?

(Reni)

Terima kasih Erwin. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Reni dari Narasita, kami memang berkomitmen untuk mendorong perempuan menduduki jabatan publik. Pertanyaan dari teman-teman dan Mas Erwin sebenarnya menjadi tantangan. Namun, sebelum itu saya mau menjawab Mbak Yeni. Sejak 2014 kami menyusun kurikulum pendidikan politik bagi perempuan bersama Badan Pemberdayaan Perempuan DIY, menghasilkan 12 materi untuk pendidikan politik tingkat dasar, untuk siapa pun. Tetapi kami utamakan untuk perempuan, karena laki-laki sudah berlari di ranah publik atau politik. Sementara itu perempuan masih ada kendala yang diproduksi baik oleh perempuan sendiri maupun laki-laki. Sekarang saya menantang teman-teman laki-laki untuk menjadi feminis sejati, contohnya di Goasari kami dua tahu pendampingan untuk mendorong desa untuk mengelola aset agar inklusif, itu saja saat kami coba dorong ke RAB desa mereka tidak paham siapa saja yang harus menerima.

Jangan langsung dipukul rata anak yatim, kalau dia punya sawah luas? Ini sudah kami pikirkan sejak lama, 2015 kurikulum kami terapkan di 35 kecamatan. Sembari menghadapi pemilu serentak, kami mensyaratkan 10% dari 30% kuota adalah perempuan difabel.

Dari 2015 ada yang memprotes kenapa hanya perempuan kan masyarakat ada macam-macam. Padahal banyak laki-laki yang mau ikut tetapi karena SOP tidak bisa. Hanya di Wonosari saja, ada peserta laki-laki ikut selama tiga hari, dan menurut dia laki-laki penting untuk memahami ini. Karena materi dasar ini yang sama-sama tidak dipahami. SDGs ini masih jauh dari literasinya walaupun secara praktik sudah dilakukan perempuan di desa dan kota. Namun politik juga bagi perempuan masih dianggap bagian laki-laki. Setelah kami kupas bersama-sama, hari ketiga itu peserta malas beranjak untuk pulang, artinya mereka haus untuk memahami. Misal gender, semua orang punya definisinya masing-masing masalahnya setara dan adil atau tidak. Setelah kelas yang kami lakukan di Sleman teman-teman memahami bahwa pekerjaan domestik itu bisa dikerjakan oleh laki-laki. Artinya memahami SDGs adalah tanggung jawab laki-laki dan perempuan, apa lagi ketika mereka terlibat dalam menyusun anggaran ataupun Perdes. Saya kira ini tugas laki-laki dan perempuan tidak bisa satu saja, karena ketika satu saja yang diberi maka ketika sampai rumah akan terjadi cekcok karena berbeda pemahaman. Misal untuk menyusui bapak sekarang pun bisa dengan dot misalnya.

Dengan adanya tekanan Pengarus Utamaan Gender yang disahkan oleh Gus Dur tahun 200, tetapi juga belum merata. Dan ini baru kita kenalkan ke desa, karena sangat sulit memang untuk sosialisasinya. Kalau kita memang mau memanfaatkan teknologi bisa menjadi pendorong masyarakat untuk memahami pengarus utamaan gender. Lewat cara ini kita dapat melihat dengan mudah peran perempuan. 2016 pansus di Sleman gagal karena baik laki-laki dan perempuan tidak paham, baru setelah ada Permendari 11 tahun 2016 baru dilaksanakan. Dan baru sebagian desa di sini panitianya hanya ikut saja, minimal satu saja. Peran Kades memang sangat sentral karena dari kader yang kami didik pun tidak masu padahal memiliki keinginan dan kemampuan. Sehingga kemarin ketika ada pelatihan saya suruh minimal di APB desa minimal ada dua slot. Karena tanpa itu kita semakin buta tentang politik, apalagi di era yang benar bisa salah dan salah bisa benar ini perlu dorongan yang kuat agar tidak terlalu menyimpang dari SDGs. Tadi sudah diminta bagaimana PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender), kalau saya tidak hanya gender tetapi adil

gender, harus ada kata adil karena sebelum adil harus setara dulu, tetapi adil belum tentu setara.

Menjawab pertanyaan Erwin, saya sampai warning di grup PPSW tolong dikawal. Karena 2016 saya membuat skema pertama mengawal raperda, kedua mengawal pengisian, dan sekarang kami meningkatkan kapasitas perempuan desa agar menjadi supporting grup. Contoh di Condongcatur memang bisa 4, tetapi pemilihan wakil perempuan ini yang memilih adalah para calon sendiri dan ini salah. Untuk pertama kali ya sudahlah diakomodasi dulu, memang perlu peningkatan kapasitas tidak hanya perempuan. Kalau perempuan tinggal diasah sedikit sudah baik, tetapi karena selama ini mereka mengalami beban ganda yang diciptakan oleh masyarakat. Termasuk perempuan tidak boleh mendobrak, mengurangi beban perempuan adalah membagi tugas rumah kepada seluruh anggota keluarga. Bapak tidak haram untuk mencuci, begitu juga anak bisa dididik untuk belajar bertanggung jawab sehingga bisa mengurangi beban ibu. Jadi perempuan tidak boleh hanya dikurung dalam rumah, karena itu juga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kalau tanggung jawab memajukan masyarakat itu semua. Kalau secara kiproah perempuan secara defacto memang iya namun secara formal belum diakui, bahkan teman-teman yang melakukan juga belum menyadari kalau sudah melakukan tujuan dari SDGz. Itu dari saya terima kasih.

(Erwin)

Semakin menarik apakah ada pertanyaan lagi? Silakan.

(Ahmad Ramali)

Saat ini kami sedang melakukan kelas bersama dengan warga patuk, dan sebagian besar pesertanya adalah perempuan. Strategi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi hal ini? Kedua kami berharap IRE mau mendampingi kami.

(BPD Sukoharjo)

Assalamualaikum Wr Wb, saya BPD Sukoharjo, Desa kami dari 9 anggota BPD 4 di antaranya adalah perempuan. Kemarin juga sempat ada gejolak karena ada ambisi dari ketua BPD yang lama untuk maju lagi tetapi tidak terpilih, tetapi masih berjalan dengan lancar. Dari pelatihan kemarin membuka mata kami ternyata di desa belum ada seperti itu. ketika dilakukan Musdus dan Musreng perempuan yang diundang itu berbeda sehingga mereka

tidak paham apa yang terjadi. Ini kami memberikan masukan kepada dukuh yang diundang itu tidak hanya RT dan RW perempuan juga harus dilibatkan, karena ketika ada kegiatan desa lebih banyak yang terlibat itu perempuan. Itu kendala di kami, bahkan perangkat desa ada yang kecepelosan kenapa harus ada pembinaan-pembinaan. Dengan adanya diskusi hari ini memberikan semangat lagi ke kami untuk melakukan kegiatan di desa. Mungkin itu yang bisa saya curhatkan terima kasih.

(Erwin)

Mungkin pembicara ada yang mau menambahi?

(Dina)

Hari ini bertepatan dengan peringatan hari perempuan internasional yang pertama kali di peringati, walaupun berikutnya di 8 Maret. Tetapi ada juga yang mencatat 28 Februari adalah hari perempuan internasional. Bagi kami IRE, ini adalah momentum untuk merefleksikan bagaimana di desa ada kerentanan-kerentanan karena ketidakadilan gender. Di level nasional, kita melihat bagaimana buruknya kinerja, dapat dilihat dari ketika RUU ketahanan keluarga diloloskan atau diterima oleh presiden untuk dibahas. Ini konyol, yang primitif tidak hanya desa tetapi negara, ini primitif jika negara membahas domestifikasi perempuan. IRE memang tidak secara spesifik bicara isu perempuan, tetapi perspektif yang kita gunakan ada dua. Pertama soal desa dan kedua Gesi. Jadi bagaimana keadilan gender dan inklusi sosial menjadi arus utama di dalam advokasi kebijakan kita. Ke depan kita juga akan membahas Onibuslaw, jadi bagaimana posisi perempuan di dalam draf RUU tersebut dan kerentanan-kerentanan apa yang mungkin terjadi. Jadi kami akan memanfaatkan momentum hari perempuan nasional sebagai refleksi atas ketidakadilan gender yang masih terjadi hingga hari ini. Mungkin itu saja.

(Arie)

Saya senang ketika mendengar ada 4 perwakilan perempuan di satu desa. saya kira kalau kita perempuan paham posisinya penting dalam pembuatan keputusan, akan membuat banyak perempuan lain untuk tertarik. Saya melihat mereka tidak tertarik karena belum tahu dan paham. Harapannya kita secara terus menerus pendidikan politik, pemahaman ini untuk semua. Ketika kita membicarakan kebutuhan dasar perempuan harus dilibatkan. Saya kira memang perlu waktu dan kerja keras terus menerus agar target SDGs tercapai.

(Rerni)

Kami tidak akan hanya berhenti pada pengisian BPD. Tetapi akan dilanjutkan dalam momentum selanjutnya, salah satunya adalah pemilihan kepada desa.

(BPD Sukoharjo)

Menambahkan, di desa kami belum lama ini ada pemilihan dukuh dari tiga dukuh dua yang terpilih adalah perempuan. Dan kami selalu mengawal ketika pemilihan dengan bantuan institusi terkait. Terima kasih

(Erwin)

Dari apa yang sudah di sampaikan ada berubah positif terkait perempuan dalam menciptakan pertumbuhan. Ini menjadi obor pembelajaran untuk kita semua dari hulu ke hilir, bagaimana mendorong perempuan pecara diri untuk mengisi peluang-peluang yang ada. Lalu memanfaatkan peluang-peluang itu sehingga bermanfaat bagi keadilan dan kesetaraan. Saya kira yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana konsistensi kita dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat. Terima kasih dan mohon maaf jika selama memandu acara ada kesalahan.